



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SENIOR OFFICIALS' MEETING 2+2 INDONESIA-CHINA DAN ISU LAUT CHINA SELATAN

Simela Victor Muhamad
Analisis Legislatif Ahli Utama
simela.muhamad@dpr.go.id

Desty Bulandari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
desty.bulandari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, telah berlangsung Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Senior Officials' Meeting (SOM 2+2) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia-China. Dalam SOM 2+2 Indonesia-China yang baru pertama kalinya itu, Indonesia diwakili oleh Abdul Kadir Jailani, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Urusan Asia-Pasifik dan Afrika Kemenlu RI serta Brigadir Jenderal Oktaheroe Ramsi, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan RI. Adapun delegasi China dipimpin oleh Sun Weidong dan Zhang Baoqun selaku Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Kepala Kantor Kerja Sama Militer Internasional Komisi Militer Pusat.

Pertemuan tersebut bermula dari Nota Kesepahaman yang disepakati saat kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Beijing pada Oktober 2023. Lebih lanjut, pertemuan atau dialog ini merupakan langkah strategis setelah kunjungan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, ke Beijing pada bulan April 2024. Dirjen Jailani menyatakan bahwa SOM 2+2 ini menandai babak baru dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China. Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berfungsi sebagai langkah persiapan untuk dialog tingkat menteri yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2025, sebagai bagian dari rangkaian perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.

SOM 2+2 Indonesia-China menghasilkan kesepakatan mengenai kerja sama dalam pengembangan kapasitas bagi diplomat serta pelatihan militer bersama antara kedua negara. Selain itu, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, mencegah terorisme, serta mengatasi kejahatan transnasional. *Top of Form* dalam pertemuan tersebut, dipaparkan sikap dan usulan terkait dengan isu-isu yang menyangkut kepentingan China, di antaranya isu Laut China Selatan.

Isu Laut China Selatan telah menjadi aspek penting dan kompleks dalam kemitraan Indonesia-China. Meskipun kedua negara memiliki kerja sama yang kuat dalam berbagai sektor, ketegangan sering muncul terkait klaim teritorial China di Laut China Selatan, yang mencakup area yang juga diklaim oleh Indonesia sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. Sementara China berusaha memperkuat klaimnya melalui berbagai langkah militer dan diplomatik, Indonesia menganjurkan penyelesaian melalui negosiasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

SOM 2+2 Indonesia-China, dapat dijadikan sebagai *platform* penting untuk membahas isu Laut China Selatan, di mana Indonesia mengambil peran sebagai pendorong dialog antara China dan negara-negara ASEAN, terutama untuk mencapai kemajuan dalam negosiasi dan pembahasan *Code of Conduct* (CoC) Laut China Selatan yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Perampungan CoC terkait Laut China Selatan penting dilakukan untuk menjamin stabilitas

kawasan dan mendorong negara-negara ASEAN menegakkan kedaulatan atas wilayah maritimnya. Hal tersebut menunjukkan konsistensi sikap Indonesia bahwa isu Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai melalui dialog, sebagaimana yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan ASEAN-China Post-Ministerial Conference (PMC) yang berlangsung di Laos, pada 26 Juli 2024. Melalui langkah-langkah diplomasi yang ditempuh Indonesia, diharapkan dapat tercipta kestabilan dan kemajuan bagi kawasan Laut China Selatan dan seluruh Asia Tenggara. Terlebih, Asia Tenggara merupakan kawasan maritim penting yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia.

Atensi DPR

SOM 2+2 Indonesia-China memiliki arti strategis karena melalui forum ini isu-isu penting yang berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara (terutama yang menyangkut isu luar negeri dan pertahanan) dapat dibicarakan. DPR RI, khususnya Komisi I, melalui fungsi pengawasan perlu mengawal dan memastikan bahwa implementasi dari kesepakatan yang dihasilkan SOM 2+2 Indonesia-China, baik terkait dengan kerja sama pengembangan kapasitas diplomat maupun pelatihan militer bersama, memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan nasional Indonesia.

Komisi I DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar memanfaatkan forum SOM 2+2 Indonesia-China ke depan untuk mendukung penyelesaian damai konflik Laut China Selatan. Terkait hal ini, Komisi I DPR RI juga perlu terus mengingatkan Kemenlu RI dan Kemenhan RI agar penyelesaian sengketa Laut China Selatan, yang mencakup area dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, ditangani dengan hati-hati. Langkah-langkah diplomasi diharapkan dapat mewujudkan kestabilan regional dengan memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.

Sumber

antaranews.com, 4 Juli 2024;
chinaglobalsouth.com, 16 Agustus 2024;
globaltimes.cn, 13 Agustus 2024;
kemlu.go.id, 13 Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.